

8

IMPLEMENTASI PROGRAM WOLBACHIA DALAM PENANGANAN KASUS DBD DI KOTA SEMARANG

Muhammad Hilmi Arminta, Dewi Roestyarningsih, Hardi Warsono

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1296

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penerapan program Wolbachia mengakibatkan ditemukannya beberapa kasus penyakit demam berdarah di Kota Semarang sehingga penyebaran kasus demam berdarah di Kota Semarang belum cukup terkendali sehingga hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Wolbachia pada masyarakat di Kota Semarang. Selain itu untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat terkait implementasi program Wolbachia di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Semarang menerapkan implementasi program Wolbachia melalui lima kriteria yaitu akses, cakupan, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan sumber daya. Berdasarkan kriteria yang telah diimplementasikan di Dinas Kesehatan Kota Semarang hanya kriteria akses dan cakupan yang masih belum optimal, sedangkan kriteria lainnya sudah baik dalam pengimplementasiannya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada implementasi program Wolbachia, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Sosialisasi dan edukasi tersebut dapat dilakukan dengan kampanye informasi, pelatihan, dan workshop secara intensif agar wawasan yang diharapkan pemerintah sampai kepada masyarakat dan penyediaan laboratorium di Kota Semarang yang dilengkapi dengan peralatan modern.

Kata kunci: Demam Berdarah Dengue, Wolbachia, Implementasi Program

ABSTRACT

The implementation of the Wolbachia program resulted in the discovery of several cases of dengue fever in Semarang City so that the spread of dengue fever cases in Semarang City has not been sufficiently controlled so this is a concern for the public. The aim of this research is to determine the implementation of the Wolbachia program in the community in Semarang City. Apart from that, to find out the driving and inhibiting factors related to the implementation of the Wolbachia program in Semarang City. The research results show that the Semarang City Health Service implements the Wolbachia program through five criteria, namely access, coverage, accuracy of services, accountability and resources. Based on the criteria that have been implemented at the Semarang City Health Service, only the access and coverage criteria are still not optimal, while the other criteria are already well implemented. Factors that need to be considered in implementing the Wolbachia program include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Recommendations that can be given are that socialization and education can be carried out with intensive information campaigns, training and workshops so that the insight expected by the government reaches the public and the provision of laboratories in Semarang City that are equipped with modern equipment.

Keywords: *Dengue Hemorrhagic Fever, Wolbachia, Program Implementation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bergantung pada kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah hak konstitusional warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana pemerintah bertanggung jawab menciptakan kenyamanan dan akses bagi masyarakat. Saat ini, masyarakat mengharapkan pelayanan yang efisien, efektif, tepat waktu, transparan, akuntabel, serta memanfaatkan kemajuan teknologi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan. Kesehatan

merupakan hak asasi manusia yang wajib dimiliki setiap individu, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang setara, sebagaimana diatur dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 3. Salah satu ancaman kesehatan adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan berkembang biak di lingkungan yang kurang bersih, terutama di area dengan genangan air. Selain itu, faktor iklim ekstrem seperti El Nino juga berkontribusi pada penyebaran nyamuk dan meningkatkan risiko DBD di berbagai negara tropis.

Data Penyakit DBD di Indonesia Periode 2019-2023		
Tahun	Kasus	Meninggal
2019	138.127	919
2020	108.303	747
2021	73.518	705
2022	143.266	1.237
2023	114.720	894

Tabel 1.1. Kasus DBD secara nasional periode 2019-2023

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa kasus Demam Berdarah Deunge (DBD) di Indonesia dalam skala nasional mengalami fluktuatif yang tidak pasti pada periode 2019-2023. Kasus tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah kasus yaitu 143.266 dengan kasus kematian yaitu 1.237 kasus. Pada tahun 2023 mengalami penurunan kasus yaitu menjadi 114.720 kasus dengan kasus kematian yaitu 894 kasus.

Jawa Tengah yang berada diantara Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki total penduduk sekitar 37 juta. Jawa Tengah memiliki kekayaan alam melimpah dengan budayanya yang beraneka ragam. Dibalik itu semua, Jawa Tengah memiliki berbagai permasalahan yang serius, salah satunya yaitu penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD). Berdasarkan pada tabel 1.2 dibawah, dijelaskan bahwa pada tahun 2019-2023 bahwa jumlah pendertia dan kasus meninggal mengalami fluktuatif. Jumlah kasus tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 12.476 kasus dengan kasus

meningga yaitu 260 orang sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan menyentuh pada angka 6.659 dengan jumlah kasus meninggal yaitu 143 orang.

Sumber: Profil Kesehatan Indonesia Periode 2019 - 2023, 2024

Data Penyakit DBD di Jawa Tengah Periode 2019-2023		
Tahun	Kasus	Meninggal
2019	9.124	123
2020	5.683	107
2021	4.468	121
2022	12.476	260
2023	6.659	143

Tabel 1.2. Kasus DBD Jawa Tengah periode 2019-2023

Kota Semarang merupakan ibukota dari provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang salah satu kota metropolitan dengan merupakan pusat perdagangan dan perekonomian di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebanyak sekitar 1,6 juta dan akan terus bertambah. Isu masalah kesehatan menjadi isu utama dalam Kota Semarang terutama permasalahan Demam Berdarah Dengue (DBD), maka dari itu pemerintah merancang regulasi terkait permasalahan penyakit Demam Berdarah Dengue tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue.

Sumber: Website Pemerintah Kota Semarang, 2023

Data Kasus Penyakit DBD di Kota Semarang Periode 2019-2023		
Tahun	Kasus	Meninggal
2019	440	14
2020	319	4
2021	332	9
2022	865	33
2023	404	16

Tabel 1.3. Data kasus DBD di Kota Semarang, 2019-2023

Berdasarkan pada tabel 1.3. dijelaskan bahwa kasus kasus DBD di Kota Semarang mengalami kondisi kasus yang tidak tetap dengan angka paling tinggi pada 865 kasus pada tahun 2022 dengan kasus kematian yaitu 33 jiwa sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan kasus kasus sebanyak 404 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 16 jiwa.

Kota Semarang menghadapi masalah kesehatan utama terkait penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), dengan 857 kasus dan 33 kematian pada tahun 2022. Meskipun jumlah kasus menurun menjadi 404 pada tahun 2023, situasi ini masih mengkhawatirkan. Penyebaran DBD dipengaruhi oleh faktor iklim yang mendukung perkembangbiakan nyamuk *Aedes aegypti*, ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, mencapai 4.534,07 jiwa/km². Untuk menangani masalah ini, Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Nota Kesepakatan dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

penyelenggaraan Pilot Project Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia. Program ini, yang dikenal sebagai “Wolbachia Ing Kota Semarang (WINGKO SEMARANG)” yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran DBD di kota tersebut.

Penelitian terkait Wolbachia dimulai sejak tahun 2013 di Jogjakarta dan diimplementasikan pada tahun 2016, berhasil menurunkan kasus DBD hingga mencapai rekor terendah 67 kasus pada tahun 2023. Mekanisme program ini tercantum dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, yang meliputi identifikasi habitat, persiapan alat, dan uji efektivitas. Pada tahun 2023, program Wolbachia diterapkan di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2022. Kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kota Semarang bertujuan untuk mengendalikan penularan DBD. Program ini telah menunjukkan dampak positif dengan penurunan kasus DBD di Kota Semarang.

Pelaksanaan program Wolbachia di Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakdisiplinan 'orang tua asuh' dalam merawat telur Wolbachia yang dapat mengakibatkan kerusakan akibat serangga, cuaca, dan angin. Selain itu, keraguan mereka dalam

perawatan juga menjadi hambatan, sementara cuaca panas menyulitkan penetasan telur. Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi terkait program ini, dan masih terdapat kasus DBD yang mengkhawatirkan. Keresahan masyarakat muncul karena penyebaran DBD belum terkendali meskipun program Wolbachia diharapkan efektif. Penelitian ini berfokus pada pengentasan sarang nyamuk dengan judul “**Implementasi Program Wolbachia Dalam Penanganan Kasus DBD di Kota Semarang**”.

LANDASAN TEORI

A. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (Keban, 2008) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur urusan publik (public affairs) dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

B. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (Miftah Thoha, 2011: 107), kebijakan publik adalah segala sesuatu merupakan pilihan pemerintah yang berupa penerapan ataupun tidak diterapkannya

pilihan tersebut. Thomas R. Dye menekankan bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah adalah merupakan kebijakan publik.

C. Implementasi Kebijakan

implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai tahap dimana pemerintah mengambil suatu tindakan atau keputusan dengan menjalankan sebuah kegiatan yang memiliki dampak bagi publik.

Salah satu teori implementasi kebijakan yaitu menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dengan kriteria sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam proses terjadinya implementasi kebijakan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran agar dapat menimalisir dan menekan terjadinya distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Setelah melalui proses pelaksanaan komunikasi yang telah dilaksanakan secara jelas dan benar, perlu diperhatikan terhadap sumber daya yang dimiliki baik itu dapat berupa kompetensi dari

implementor dan/atau sumber daya finansial. Apabila pelaksana kebijakan mengalami kekurangan dalam sumber daya maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif.

3. Disposisi

Disposisi dapat disebut juga dengan watak, karakteristik, dan sikap para implementor seperti sikap jujur, komitmen, dan demokratis. Sebagai implementor yang baik, implementasi kebijakan harus dapat dilaksanakan sejalan dengan disposisi yang baik. Apabila sebaliknya, maka implementasi kebijakan tidak akan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4. Struktur Birokrasi

Kriteria ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam implementasi kebijakan pada setiap organisasi. Adanya SOP (Standart of Procedure) yang menjadi bagian dari kriteria struktur birokrasi menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam melakukan tindakan.

D. Implementasi Program

Policy output digunakan untuk mengetahui yang dirasakan oleh

kelompok sasaran secara langsung akibat dari adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hadiah, dan subsidi dari implementasi kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas *policy output* dari implementasi program, dapat dilihat berdasarkan lima aspek penting menurut Cole, Martin, dan Parston (dalam Purwanto, 2015) adalah:

1. Akses, memiliki pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi seluruh kelompok sasaran dan tidak terjadinya diskriminasi dalam terlibat dan menikmati manfaat dari program tersebut.
2. Cakupan, dalam menelaah seberapa besar kelompok sasaran yang dapat dijangkau dengan adanya program tersebut.
3. Ketepatan layanan, memiliki nilai dan peran penting dalam implementasi program dalam menilai pelayanan yang diberikan dengan program tersebut sesuai dengan tujuan program.
4. Akuntabilitas, digunakan sebagai acuan nilai terhadap pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan tugasnya kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

5. Kesesuaian program dengan kebutuhan, kriteria ini digunakan untuk mencermati dan menelaah terkait keluaran dari program yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok sasaran telah sesuai dengan kebutuhan atau belum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan lokus pada penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan fokus dari penelitian ini yaitu terkait implementasi program Wolbachia di Kota Semarang dengan mengambil informan menggunakan *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan, yakni data primer dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal hasil penelitian terdahulu, jurnal artikel ilmiah, dan berita.

Analisis dan interpretasi data menggunakan analisis data kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu pengambilan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Kualitas data dalam penelitian ini dibuktikan melalui uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Wolbachia di Kota Semarang

1. Akses

Pada kriteria akses, menunjukkan bagaimana implementasi Program Wolbachia dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mampu memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kesempatan yang sama dalam menerima program ini kepada sasaran kelompok yaitu masyarakat.

Pelayanan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat supaya terdapat peningkatan taraf hidup masyarakat, sehingga aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh program atau pelayanan dari pemerintah perlu menjadi perhatian bagi pemerintah supaya tujuan dari program dapat tercapai.

Menurut Thohari (2014), Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi nilai yang esensial sebab pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dapat memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat apabila tidak dapat diakses oleh masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kendala pada kriteria akses ini terkait sikap skeptis oleh beberapa masyarakat terhadap program ini terkait dampak positif yang ditimbulkan dari program yang belum berhasil untuk diselesaikan. Hal tersebut disebabkan Dinas Kesehatan Kota Semarang belum cukup mampu untuk mengatasi isu berita bohong yang beredar yang terus menyebar dengan cepat dan muncul kembali ke lingkungan masyarakat secara intensif serta rendahnya literasi masyarakat terhadap kebermanfaatan program Wolbachia.

2. Cakupan

Kriteria cakupan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana Dinas Kesehatan Kota Semarang belum cukup optimal untuk menunjukkan bagaimana implementasi Program Wolbachia kepada seluruh sasaran kelompok dengan dijangkau program ini kepada seluruh masyarakat dalam penggunaan program Wolbachia maka menurunkan tingkat kasus DBD di Kota Semarang.

Menurut Siagan (dalam Tama Krisnahadi et al., 2021:556) bahwa apabila memiliki sumber daya manusia yang terdidik, terampil, disiplin, tekun bekerja keras, dan memiliki budaya kerja yang tinggi

meskipun sumber daya lain yang dimiliki minim akan tetapi kinerja implementasi akan dapat berjalan secara maksimal.

Pada kriteria ini baik dalam observasi dan wawancara ditemukan kendala yang mampu menghambat jalannya program ini, yaitu tidak seluruh masyarakat dapat menjadi cakupan dalam program ini secara langsung sebab ketidakinginan masyarakat menerima program dengan berbagai macam alasan apapun. Hal tersebut menjadi salah satunya bahwa kriteria cakupan dalam implementasi Program Wolbachia belum cukup optimal dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut diperlukan waktu yang cukup lama untuk menjangkau seluruh masyarakat Kota Semarang disebabkan adanya keterbatasan pada sumber daya, baik itu pada tenaga ahli, sumber daya keuangan, dan perangkat, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang secara merata.

3. Ketepatan layanan

Pada kriteria ketepatan layanan, menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Semarang sudah cukup efektif dalam memberikan

pelayanan yang tepat pada sasaran kelompok. Hal tersebut didorong dengan kesigapan dan menerima respon yang cepat dengan memberikan pelayanan program dalam memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Mulai dari awal pelaksanaan program hingga saat ini, hadirnya program Wolbachia mampu memberikan pengaruh kepada tingkat kasus DBD di Kota Semarang.

Menurut Junior et. al. (2019) mengatakan bahwa kualitas layanan merupakan perbandingan antara kualitas layanan antara yang diharapkan oleh masyarakat dengan yang dirasakan oleh masyarakat. Kualitas layanan yang sempurna dapat dinilai berdasarkan keinginan atau harapan masyarakat dengan realita di lapangan dari produk tersebut. Dalam mencapai tujuan program, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan segala upaya dalam meningkatkan efektifitas pelayanan. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan pengawasan pada tingkat wilayah terkait pelaksanaan program di lapangan. Menurut Kunaryo (dalam Prijambodo, 2014), monitoring atau pengawasan adalah kegiatan pengamatan implementasi program ketika program sedang

dilaksanakan dan melakukan perbaikan pada akhir program sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan berfungsi sebagai dalam mengawasi keberjalanan program yang diberikan kepada sasaran kelompok yang sesuai dengan perencanaan sehingga keberhasilan program dapat tercapai.

Adanya pengawasan tersebut bertujuan supaya Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai pelaksana program untuk mengetahui bagaimana kondisi keberjalanan dari program tersebut sehingga dapat melakukan pengoptimalan dalam pelaksanaan program Wolbachia selanjutnya dengan meminimalisir kesalahan yang terjadi.

Kriteria ketepatan layanan dalam Implementasi Program Wolbachia dapat dikatakan cukup berhasil. Pengawasan program secara intensif dan berkala, konsultasi dengan pihak eksternal dari program ini, serta pelibatan dengan para tokoh masyarakat untuk meningkatkan keefektifan implementasi program untuk mewujudkan tujuan pemerintah pusat yaitu nol kematian akibat Dengue pada tahun 2030 melalui bentuk kontribusi nyata Dinas Kesehatan Kota Semarang

selama implementasi Program Wolbachia.

4. Akuntabilitas

Pada kriteria akuntabilitas, dalam hal ini menunjukkan bagaimana pelaksana kebijakan memberikan pelayanannya kepada masyarakat dengan rasa bertanggung jawab dan rasa tinggi dalam menjalankan kewajiban mereka saat bertugas baik di lapangan atau tidak demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.. Hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan evaluasi pasca program Wolbachia sehingga Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat mengetahui kekurangan dalam pengimplementasian pada kecamatan sebelumnya yang dapat menjadi pembelajaran untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kelak pada kecamatan selanjutnya.

Bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui program ini yaitu dibuktikan dengan sikap komitmen mereka dalam merespon secara cepat dan tanggap terkait keluhan dari masyarakat, selain itu juga dalam mendapatkan hasil dari program pelaksanaan program Wolbachia, mereka menerima data yang aktual, fakta, dan tidak ada unsur perubahan dari campur tangan manusia,

sehingga dalam pelaporan program kepada masyarakat secara berkala dan intensif menggunakan hasil yang aktual dan fakta berdasarkan implementasi yang berasal hasil dari integritas dan pertanggungjawaban mereka selama pelaksanaan program dipaparkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Surjadi yang berpendapat bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban instansi publik supaya dapat berfokus kepada bentuk pertanggungjawabannya secara horizontal kepada masyarakat (Surjadi, 2009:128).

5. Kesesuaian program dengan kebutuhan

Pada kriteria kesesuaian program dengan kebutuhan, menunjukkan bagaimana program Wolbachia mampu memberikan keefisienan pada pengguna dalam menggunakan program Wolbachia.

Kebutuhan pada implementasi program Wolbachia dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik didorong dengan manfaat yang dirasakan yaitu adanya keefisienan dalam penggunaan program ini dengan melibatkan seluruh pihak di lingkungan masyarakat. Pelibatan ini melibatkan seluruh pihak yang

memiliki pengaruh di lingkungan sekitar sehingga dalam proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Manfaat program ini juga mampu dalam menekan angka kematian akibat Dengue. Selain itu, sebelum Dinas Kesehatan Kota Semarang melaksanakan implementasi Program Wolbachia di wilayah Kota Semarang, mereka menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan dengan program yang akan diterapkan.

Dalam kriteria kesesuaian program dengan kebutuhan pada implementasi program Wolbachia ini dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut didorong adanya faktor penetapan SOP terkait pelaksanaan program Wolbachia agar dapat terwujud dengan lancar, sehingga terdapat alur dan kejelasan dalam melaksanakan implementasi program.

B. Faktor-faktor pendorong atau penghambat terkait Implementasi Program Wolbachia di Kota Semarang

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan modal dalam kesuksesan suatu organisasi. Komunikasi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program dan metode untuk para pelaksana

kebijakan dalam menjalankan kebijakannya.

Komunikasi terjadi apabila seseorang atau sekelompok organisasi menciptakan pesan yang kemudian pihak lain menafsirkan hingga menjadi suatu pertunjukan dan menciptakan pesan baru (menurut Sumual, dalam Cristian I. R. Rengkung et al., 2021:27). Pendapat tersebut sesuai dengan implementasi Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam menerapkan model komunikasi pada masyarakat Kota Semarang. Informasi menjadi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh wawasan yang diinginkannya. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai macam cara sesuai dengan kondisi dan situasi di lingkungan

Hal tersebut menunjukkan bahwa model komunikasi yang diterapkan Dinas Kesehatan Kota Semarang belum cukup baik. Penyebaran isu berita bohong terkait program Wolbachia menjadi permasalahan Dinas Kesehatan Kota Semarang di media sosial. Jejak digital susah untuk dihilangkan terlebih lagi terkait informasi negatif dari Program Wolbachia yang disebar pada media sosial.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan kebutuhan bagi individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu. Bentuk-bentuk sumber daya bermacam-macam, meliputi staf atau sumber daya manusia (SDM), informasi, dan fasilitas. Sumber daya menjadi elemen penting dalam menciptakan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Salah satu factor kunci kesuksesan suatu organisasi dalam mencapai visi dan misinya yaitu kualitas SDM yang baik (Rani et la., 2017). SDM menjadi faktor kunci keberhasilan dalam implementasi program dan merupakan aset penting yang perlu dikelola secara baik sebab merupakan penggerak utama dalam aktivitas organisasi.

Dinas Kesehatan Kota Semarang mengaku pada saat pelaksanaan Program Wolbachia mengalami kekurangan terkait sumber daya. Sumber daya menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kekurangan sumber daya tersebut dapat dari sumber daya manusianya yang dimilikinya seperti SDM tenaga ahli yang kurang secara kuantitas serta sumber bahan baku untuk perkembangbiakan nyamuk ber-

Wolbachia. Penyebab lainnya adalah dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kota. Pemerintah Kota Semarang perlu menerapkan strategi baru dengan keterbatasan dana yang dimilikinya dalam mewujudkan pengimplementasian program Wolbachia.

3. Disposisi

Menurut Edward III (dalam Indiahono, 2009:32) mengutarakan pendapatnya dengan menjelaskan terkait disposisi. Bahwa menurut beliau, disposisi adalah sikap atau aksi yang menunjukkan karakteristik seseorang yang menempel erat dengan implementor atau pelaksana kebijakan atau program. Sifat atau kebiasaan seseorang dalam beraktivitas menentukan seseorang dalam menilai karakter suatu orang.

Bentuk dari disposisi salah satunya yaitu komitmen, yang dimana komitmen adalah sikap sepenuh hati para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelayanan masyarakat untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesehatan adalah hak mutlak setiap masyarakat.

Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta dengan para garda terdepannya dalam program ini sejak awal peluncuran program ini telah berkomitmen dalam melaksanakan program ini dalam kondisi apapun. Sepanjang waktu mereka tetap melaksanakan program ini tanpa berkeluh kesah. Keterbatasan sumber daya, turun ke lapangan pada hari libur, keterlambatan penetasan telur nyamuk ber-Wolbachia bukan merupakan alasan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk tidak memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Mereka tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kondisi dan situasi apapun sehingga pemberian pelayanan program Wolbachia dapat terus berjalan dengan lancar.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memudahkan pemerintah dalam membagi lingkup wilayah kerja sesuai dengan keahlian tiap birokrat. Dalam penetapan struktur birokrasi, kehadiran Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pondasi fundamental dalam penetapan struktur birokrasi. Menurut Fatimah

(2015:11) menjelaskan pendapatnya mengenai SOP, bahwa menurut Fatimah, SOP merupakan suatu acuan atau pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar dalam suatu organisasi. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah atau tindakan berdasarkan keputusan yang telah diambil serta setiap penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan program berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis untuk menghasilkan produk yang telah ditetapkan pada standar sebelumnya.

Sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan, SOP dalam pemerintahan bertujuan supaya setiap program yang akan dijalankan sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan. Dalam keberjalanan program, para pelaksana kebijakan mampu melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan berdasarkan SOP yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kota Semarang menerapkan Program Wolbachia di lingkungan Kota Semarang. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam program berdasarkan SOP yang

telah dibuat dan ditetapkan. SOP yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam melaksanakan program ini mulai dari SOP penangkapan nyamuk, penyebaran telur, evaluasi program di lapangan, dan sosialisasi kepada masyarakat. SOP tersebut memberikan kejelasan dan keteraturan bagi pelaksana program Wolbachia ini agar berada di jalur yang benar selama pelaksanaan Program Wolbachia supaya tidak menimbulkan kerugian yang berarti baik itu penyalahgunaan wewenang, memanipulasi hasil data, dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Wolbachia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Program Wolbachia di Kota Semarang

Implementasi Program Wolbachia di Kota Semarang telah dilaksanakan cukup baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan-permasalahan yang belum dapat teratasi cukup maksimal. Pelaksanaan program Wolbachia telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut.

Pada kriteria akses, masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang akan muncul seiring dengan keberjalanan program ini seperti penolakan dari masyarakat, isu berita bohong dan menyesatkan yang berkembang, dan jumlah populasi nyamuk yang meningkat.

Pada kriteria Cakupan, pelaksanaan Program Wolbachia di Kota Semarang mencakup seluruh lapisan masyarakat, fokus pada area berkembang biaknya nyamuk Aedes. Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Puskesmas Bulusan berkomitmen menjangkau semua kelompok masyarakat untuk menurunkan kasus DBD secara signifikan. Meskipun ada tantangan dalam sumber daya manusia, keuangan, dan waktu, kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan. Program ini dilaksanakan melalui empat tahapan di empat kecamatan, namun masih terdapat kendala dalam menjangkau semua masyarakat. Dengan penguatan struktur birokrasi dan kolaborasi yang efektif,

Pada kriteria ketepatan layanan, dinas Kesehatan Kota Semarang telah cukup berhasil dalam menerapkan ketepatan layanan dalam pelaksanaan Program Wolbachia. Pelayanan yang efektif dan tepat sasaran dicapai melalui pengawasan berkala, layanan konsultasi dengan pihak eksternal, serta pelibatan tokoh masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen

pemerintah dalam menyelaraskan tujuan program dengan kebutuhan masyarakat. Program ini berhasil menurunkan kasus DBD di Kota Semarang dan berkontribusi terhadap tujuan nasional, yaitu mencapai nol kematian akibat Dengue pada tahun 2030. Pelibatan masyarakat dan partisipasi tokoh-tokoh penting juga memainkan peran penting dalam keberhasilan program tersebut..

Pada kriteria akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Semarang telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Wolbachia. Mereka menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan komitmen untuk merespons keluhan masyarakat secara cepat dan sigap. Sikap ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik, yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan hasil programnya kepada masyarakat. Evaluasi berkala dan penggunaan data faktual membuktikan bahwa Dinas Kesehatan berkomitmen terhadap pelayanan yang berkualitas dan terbuka, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Pada kriteria kesesuaian program dengan kebutuhan, Proses perencanaan Program Wolbachia di Kota Semarang

dilakukan melalui penelitian awal untuk menentukan lokasi yang tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kasus DBD yang meningkat. Titik-titik penangkapan nyamuk *Aedes aegypti* dan penyebaran nyamuk *Wolbachia* dipilih secara strategis.

Faktor pendorong dan faktor penghambat

1. Faktor pendorong

Pada kriteria disposisi, Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukkan komitmen penuh dalam pelaksanaan Program Wolbachia, meski menghadapi kekurangan tenaga kerja. Mereka tetap melayani masyarakat, bahkan saat libur, dengan menangani keluhan dan melakukan penangkapan nyamuk.

Pada kriteria struktur birokrasi, Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki SOP yang mencakup penangkapan nyamuk, penyebaran telur, evaluasi lapangan, dan sosialisasi masyarakat dalam Program Wolbachia. SOP ini memastikan alur pelaksanaan yang teratur dan mencegah penyalahgunaan wewenang selama program berlangsung.

2. Faktor penghambat

Pada kriteria komunikasi, Dinas Kesehatan Kota Semarang belum cukup optimal dalam melaksanakan kriteria ini pada implementasi program Wolbachia di Kota Semarang. Kebohongan berita yang

diterima oleh masyarakat terkait program ini menurunkan kepercayaan masyarakat pada program hingga melakukan penolakan dalam menerima program ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa model komunikasi yang diterapkan Dinas Kesehatan Kota Semarang belum cukup baik.

Pada kriteria sumber daya, Dinas Kesehatan Kota Semarang menghadapi kekurangan sumber daya manusia dan bahan baku akibat keterbatasan dana dari pemerintah pusat sehingga keberjalan program Wolbachia tidak dapat berjalan cukup optimal.

B. Saran

Setelah melalui rangkaian penelitian dan analisis, hambatan dalam implementasi program ini perlu diselesaikan sehingga diharapkan pada masa yang akan datang, implementasi Program Wolbachia dalam Penanganan Kasus DBD di Kota Semarang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan intensif. Dengan adanya rekomendasi di bawah ini dapat menjadi sebuah acuan atau pedoman yang berguna dalam memperbaiki kembali implementasi Program Wolbachia pada masa yang akan datang.

1. Dalam mengatasi isu-isu dan berita bohong terkait dampak dan manfaat dari Program Wolbachia serta sikap skeptis dan kurangnya wawasan sebagian

masyarakat Kota Semarang terhadap program ini, Dinas Kesehatan Kota Semarang perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara intensif. Sosialisasi dan edukasi tersebut dapat dilakukan dengan kampanye informasi, pelatihan, dan workshop secara intensif agar wawasan yang diharapkan pemerintah sampai kepada masyarakat. Bentuk pelatihannya berupa pelatihan kepada petugas lapangan yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan pemantauan nyamuk Wolbachia, selain itu juga Dinas Kesehatan Kota Semarang perlu berkolaborasi dengan pihak swasta yang aktif dalam bidang teknologi dan informasi untuk menyebarkan kemanfaatan dan dampak positif yang dapat ditimbulkan dari program ini.

2. Untuk mendukung implementasi program Wolbachia di Kota Semarang, penting untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Pertama, penyedia laboratorium di Kota Semarang yang dilengkapi dengan peralatan modern harus tersedia untuk melakukan pengujian dan pemantauan populasi nyamuk secara efektif. Selain itu, alat penyebaran yang efisien dan ramah lingkungan perlu disiapkan agar dapat menjangkau area dengan kepadatan nyamuk tinggi. Pelatihan bagi petugas kesehatan dan relawan juga harus

dilakukan untuk memastikan mereka memahami cara menggunakan alat dengan benar. Penguatan infrastruktur ini sangat penting agar program dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Dengan dukungan fasilitas dan sumber daya yang tepat, peluang keberhasilan program dalam mengendalikan nyamuk akan meningkat. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada penurunan insiden penyakit yang ditularkan oleh nyamuk.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, R. A., & Nasrullah, N. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 172–189. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>
- Adi, A. A. K. K. (2022). Penerapan sop (standart operating procedure) butler di villa massilia. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis*, 1(1), 24–38. <https://doi.org/10.22334/paris.v1i1.3>
- Adriansyah, A., Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34108>
- Afila, R., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2022). Pengawasan Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 1–21. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/35822>
- Aminah, A., Hasan, E., & Ubaidullah, U. (2021). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Emas Rakyat. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3222>
- Ananda, A. R., & Nafi'ah, B. A. (2023). Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Gubernur Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 125–138. <https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.4275>
- Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *Ncaf*, 4(2018), 420–425. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art52>
- Anugrahini, Y. A., Mitra, A. A., & Kiswanto, Z. (2021). Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 25–37.
- Chotijah, F., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 5(1), 160–176.
- Fauziyah, I. A., Rusli, B., & Ismanto, S. U. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cimahi. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 224. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41310>

- Firdausi, R. I., Bestari, R. S., & Dewi, L. M. (2021). Peran Bakteri Wolbachia Terhadap Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) *Aedes aegypti*. *Jurnal Urecol*, 5(1), 513–521.
- Handityasa, O., & Purnaweni, H. (2020). Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Izin Usaha Toko Modern Minimarket Waralaba Cabang di Kecamatan Depok terkait Perda Kab.Sleman No.18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 3(18), 12–26.
- Haqie, Z. A., Nadiyah, R. E., & Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis Di Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n1.p23-30>
- Hasyim, M. H., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 365–370. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/5602>
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Julianto, B., & Agnanditiya Carnarez, T. Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Organisasi Professional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1417>
- Kinansi, R. R., & Pujiyanti, A. (2020). Pengaruh Karakteristik Tempat Penampungan Air Terhadap Densitas Larva Aedes dan Risiko Penyebaran Demam Berdarah Dengue di Daerah Endemis di Indonesia. *Balaba: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara*, 1–20. <https://doi.org/10.22435/blb.v16i1.1924>
- Krisnahadi, T., & Septika, B. H. (2021). Implementasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Produktivitas Karyawan Pada Era Revolusi Industri 4.0. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.2001>
- Kumalawati, D. A., Supriyati, E., Rachman, M. P., Oktriani, R., Kurniasari, I., Candrasari, D. S., Hidayati, L., Handayaningsih, A. E., Probowati, V. C., Arianto, B., Wardana, D. S., Pramuko, N. B., Utarini, A., Tantowijoyo, W., & Arguni, E. (2020). Wolbachia infection prevalence as common insects' endosymbiont in the rural area of Yogyakarta, Indonesia. *Biodiversitas*, 21(12), 5608–5614.

<https://doi.org/10.13057/biodiv/d211216>

Sosial Dan Ilmu Politik, 5(2), 44–54.
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/3248>

- Lestari, P. A., Tasyah, A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., Tresiana, N., & Lampung, U. (2021). Digital-Based Public Service Innovation (E-Government) in the Covid-19 Pandemic Era. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 18(2), 212–224.
- Lilianti, L., Asrul, A., Adenisatrawan, A., & Said, H. (2021). Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri Satu Atap: Mengapa dan Bagaimana. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 21(1), 1–14.
<https://doi.org/10.30651/didaktis.v21i1.6162>
- Lindawati, N. Y., Murtisiwi, L., Rahmania, T. A., Damayanti, P. N., & Widyasari, F. M. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam Rangka. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 473–476.
- M. Nur, Y., Eliza, E., & Haria, W. E. (2020). Faktor-Faktor Predisposisi yang berhubungan dengan Pencegahan DBD di Tanjung Basung Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Usang. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 9(1), 131.
<https://doi.org/10.36565/jab.v9i1.198>
- Maria, K., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Maulani, W. (2020). Penerapan Electronic Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Program E-Health Di Kota Surabaya). *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu*